

# **PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA: Pendekatan Jitu menuju Sukses Pembangunan Pendidikan Nasional**

**Oleh**

**Prof. Ace Suryadi, M.Sc., Ph.D.**  
(Guru Besar Ekonomi Pendidikan, UPI)

## **1. Latar Belakang**

Makalah ini disusun untuk menyambut dicanangkannya pendidikan budaya dan program unggulan Kementerian. Kami yakin, keberhasilan program Kemdiknas ini akan menyumbangkan karya yang paling berharga bagi keutuhan dan kemajuan bangsa di masa depan sesuai tujuan PJPN (2005-2025). Misi PJPN adalah mewujudkan: (1) masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) bangsa yang berdaya-saing; (3) masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum; (4) Indonesia yang aman, damai, dan bersatu; (5) pemerataan pembangunan yang berkeadilan; (6) Indonesia asri dan lestari; (7) Indonesia yang menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (8) Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.<sup>1</sup>

Makalah ini menawarkan suatu pemikiran dan model alternatif seputar pendidikan di sekolah dalam rangka menumbuhkan moral dan karakter. Kita semua memahami bahwa mengembangkan program Pendidikan Karakter yang efektif, tidak mungkin hanya bermodalkan "*common sense*" tetapi pasti memerlukan perspektif pemikiran yang semakin berkembang sejak beberapa abad yang lalu hingga sekarang. Moral dan karakter adalah universal, oleh karena itu, pendidikan karakter harus juga bersifat universal. Namun, setiap bangsa memiliki ciri khas sehingga pendidikan karakternya perlu disesuaikan dengan *setting* budaya dan kepribadian masing-masing. Pembentukan karakter adalah program pendidikan nilai yang seharusnya "dikemas" tidak dalam bentuk mata pelajaran, tetapi melalui perwujudan sekolah sebagai institusi karakter.

karakter bangsa oleh Menteri Pendidikan Nasional (2009-2014) sebagai salah satu

## **2. Permasalahan**

Pengalaman dalam beberapa dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional terlalu banyak berorientasi pada tujuan yang lebih pragmatis, yaitu untuk memuaskan kebutuhan material. Pola pemikiran yang pragmatis ini telah merambah pada pembangunan di berbagai bidang termasuk sector-sektor ekonomi bahkan pendidikan yang cenderung lebih ditujukan untuk kepentingan kepuasan material yang berjangka pendek. Permasalahan tersebut muncul dan bermula dari kiprah pendidikan nasional yang cenderung lebih menonjolkan dimensi teknisnya yang lebih banyak ketimbang aspek kemanusiaannya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh mutu pendidikan sampai saat ini yang belum mampu menghasilkan manusia terdidik sebagai sumber penggerak (*driving force*) pembangunan masyarakat menuju kedewasaan. Keluaran pendidikan sering menjadi beban masyarakat atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mereka akan pelayanan sosial, lapangan kerja, berbagai macam subsidi, dan lainnya. Mereka lulus dan muncul sebagai warga negara baru yang belum mampu menawarkan solusi tetapi sebaliknya justru menjadi sumber permasalahan dalam masyarakat. Masalah ini telah berlangsung sejak masa orde baru dan tampak semakin jelas setelah masa reformasi. Sejak Orde Baru, Pemerintah telah berupaya menangani permasalahan moral dan karakter dengan berbagai cara seperti pelatihan P4,<sup>2</sup> pendidikan kepribadian, pendidikan moral Pancasila dalam kurikulum sekolah, dan sebagainya. Namun, degradasi moral

<sup>1</sup> Bappenas (2009), Naskah Konsep *Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode 2005-2025*, disusun oleh Bappenas dengan berkoordinasi dengan masing-masing departemen instansi terkait.

<sup>2</sup> P4 adalah Pendidikan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk masyarakat, khususnya ABRI, PNS, pegawai swasta, pelajaran dan mahasiswa yang bertujuan untuk mengembangkan moral dan karakter masyarakat

justu marak akhir-akhir ini karena pendidikan belum berdampak positif terhadap pembentukan karakter.

Sampai sekarang kritik terhadap pendidikan muncul antara lain karena orientasi yang lemah terhadap tumbuh-kembangnya nilai-nilai hakiki kemanusiaan, baik dalam pengelolaan, pengembangan kurikulum sekolah, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan pengujian pendidikan, dan sejenisnya. Terjadi dikotomisasi yang tak perlu dalam rancangan pendidikan yang memisahkan secara tegas antara pendidikan intelektual di satu pihak, dengan pendidikan nilai di lain pihak. Rancangan seperti inilah yang ditengarai sebagai penyebab utama terjadinya krisis moral dan karakter di kalangan para peserta didik, lulusan, pendidik, bahkan pengelola pendidikan. Krisis moral dan karakter telah terjadi baik pada tingkatan individual sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, maupun kolektif yang tercermin dalam institusi pendidikan, mulai dari institusi tingkat makro sampai pada satuan pendidikan.

### 3. Perspektif dalam Pendidikan Karakter

Solusi yang jitu terhadap permasalahan karakter bangsa akan dapat diperoleh ketika pendidikan itu bermutu tinggi. Pendidikan yang bermutu menawarkan program dan strategi yang memiliki dampak jangka panjang bagi tumbuhnya karakter seseorang atau kolektif. Pendidikan yang bermutu menawarkan upaya preventif untuk mencegah degradasi moral dan karakter dalam masyarakat. Memang diakui bahwa dampak pendidikan tidak akan segera dapat dirasakan, tetapi jika berhasil akan memiliki daya tahan yang cukup kuat dan berdampak jangka panjang.

Terbentuknya budaya dan karakter bangsa hanya dapat diwujudkan jika program dan proses pendidikan tidak terlepas dari lingkungan yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan. Pendidikan karakter tidak dapat dilakukan di dalam suatu ruang hampa (*vacuum tube*) yang bebas nilai, karena karakter sangat terkait erat (*bounded*) dengan kehidupan. Tidak ada jaminan bahwa karakter peserta didik dapat terbentuk walaupun melalui mata pelajaran yang disebut "Pendidikan Agama" atau "pendidikan Moral". Apalagi jika proses pembelajarannya bebas nilai dan hanya merupakan kumpulan bahan pelajaran teori apalagi hafalan. Dengan kata lain, pendidikan karakter di sekolah tidak akan berhasil jika hanya dibebankan pada mata pelajaran yang terpisah, seperti PKN, Pendidikan Agama, atau Pendidikan Kepribadian apalagi jika proses pembelajaran tidak berbeda dengan mata pelajaran teoritis.

Belum banyak difahami dari mana munculnya krisis moral dan karakter tersebut. Substansi pendidikan yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tampaknya tidak bermasalah. Menurut pasal tersebut, penyelenggaraan pendidikan nasional didasarkan pada orientasi nilai spiritual keagamaan, akar budaya nasional, responsif terhadap tuntutan dan tantangan perubahan zaman yang berkembang demikian cepat. Ketentuan lain dalam Bab II Pasal 3 UU No. 20/2003 juga mengamanatkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Substansi yang terkandung dalam rumusan tujuan tersebut sesungguhnya sudah lengkap, walaupun cenderung kurang berwawasan. Mengapa dikotomi antara aspek intelektual di satu pihak, dengan aspek pembinaan nilai di lain pihak itu menjadi masalah? Karena, nilai-nilai yang terdapat dalam rumusan tersebut lebih bernuansa sebagai suatu daftar panjang (*long list*) yang tidak merupakan suatu kesatuan yang sinergik. Membentuk Iman dan taqwa, misalnya, disampaikan melalui pelajaran yang berbeda dengan pelajaran yang membentuk "berilmu" karena kedua jenis pelajaran tersebut dianggap memiliki dikotomi yang tidak terintegrasi. Integrasi nilai dari seluruh bahan dan proses ajar dapat mengakselerasi pertumbuhan moral dan karakter peserta didik. Tentu saja nilai tidak cukup hanya diajarkan, tetapi harus dilakukan dalam bentuk pembiasaan, pemahaman, keteladanan, dan aplikasi yang terus-menerus, hingga akhirnya peserta didik akan memperoleh suatu makna dari suatu nilai karakter. Dampaknya akan berbeda

jika nilai iman dan taqwa dapat menjiwai seluruh proses pembelajaran. Kreativitas juga tidak dapat ditumbuhkan hanya melalui mata pelajaran teori, karena kreativitas bukan merupakan bahan ajar tetapi nilai yang dapat menjiwai seluruh proses dan mata ajar yang berlangsung di sekolah. Nilai akhlak mulia juga tidak mungkin disampaikan secara parsial melalui pendidikan agama atau pendidikan kewarganegaraan saja, tetapi akhlak mulia harus dapat menjiwai seluruh proses pembelajaran dan kehidupan di sekolah.

Mungkinkah karakter bangsa akan tumbuh dan berkembang tanpa didasari oleh suatu landasan nilai moral? Pertanyaan mendasar ini penting untuk dijawab, karena tidak ada kerusakan alam yang paling parah kecuali kerusakan alam yang muncul selama dan pasca revolusi industri selama berabad-abad mulai abad ke-18 di Eropah sampai dengan revolusi industri di Asia pada abad ke-20. Revolusi industri tidak saja mendorong ekonomi berbasis eksploitasi alam, akan tetapi juga telah mendorong manusia untuk bergerak atas dasar motivasi kepuasan lahiriyah semata. Motivasi keuntungan material dalam sistem ekonomi dunia dan kini mulai merambah ke Indonesia telah menjadi tujuan hidup manusia yang paling utama sehingga lahiriah persaingan tidak sehat, perilaku konsumtif, dan ujung-ujungnya menjadi perilaku hedonis, yang telah digariskan dalam tujuan Pendidikan Nasional itu sesungguhnya sudah memiliki kandungan nilai-nilai karakter yang sangat kaya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi institusi pendidikan dan para pendidik bagaimana menterjemahkan tujuan Pendidikan Nasional tersebut menjadi strategi pembelajaran hingga secara efektif mampu menumbuhkan nilai-nilai karakter yang dicita-citakan. Namun, pada hakikatnya tidak ada proses pendidikan yang bebas nilai, tidak ada juga sebuah nilai yang bebas rujukan. Setiap pendidik berkesempatan mengembangkan model pendidikan karakter dengan rujukannya masing-masing. Maka kemudian bagaimana mutu dari karakter yang diinginkan dapat dikembangkan secara terpadu melalui manajemen pendidikan dan pembelajaran berlandaskan pada nilai-nilai yang menjadi rujukan.

Pendidikan karakter sama tuanya dengan pendidikan itu sendiri, dan berkembang sepanjang sejarah kemanusiaan di seluruh muka bumi. Pendidikan pada hakekatnya memiliki dua fungsi, yaitu membantu warga masyarakat agar menjadi cerdas (*smart*), dan dalam waktu yang bersamaan memiliki moral dan karakter (*good*). Kedua fungsi itu harus dapat dilaksanakan melalui dua jenis program pendidikan yang tidak harus dibedakan; baik program pendidikan akademik maupun pendidikan karakter. Kedua fungsi tersebut dianggap senafas, baik dalam materi pembelajaran, melainkan juga dalam pendekatan, strategi pendidikan, maupun kriteria keberhasilannya.

Menurut Lickona (1992), pendidikan karakter adalah sarana ampuh untuk memacu kehidupan bersama yang lebih demokratis. Demokrasi ialah cerminan dari kualitas karakter manusia yang tumbuh pada setiap individu dalam konteks kehidupan kolektif. Dalam masyarakat demokratis, setiap orang memiliki komitmen moral untuk menempuh kehidupan bersama, seperti menghormati hak dirinya dan orang lain, mematuhi norma dan aturan, partisipasi dalam kebersamaan, peduli terhadap kemaslahatan hidup bersama, dan seterusnya. Thomas Jefferson yakin bahwa nilai-nilai karakter seperti itu dapat ditumbuhkan pada setiap manusia sejak usia dini sebagai fondasi untuk kehidupan. Pada awal sejarah kebangkitan Amerika, pendidikan karakter diberikan di sekolah dengan menanamkan disiplin, kejujuran, keteladanan, patriotisme, kerja keras, keberanian, dan sejenisnya.

Dalam kaitan "*smart and good citizen*", Thomas Lickona (1992) menegaskan bahwa "*...wise societies since the time of Plato has made moral education a deliberate aim of schooling. They have educated for character as well as intellect, decency as well as literacy, virtue as well as knowledge. They have tried to form citizens who will use their intelligence to benefit others as well as themselves, who will try to build a better world*"<sup>3</sup>. Penegasan tersebut menyiratkan pemahaman bahwa "*Smart and Good*" bukanlah dua konsep kualitas manusia yang bersifat

<sup>3</sup> Thomas Lickona (1992) *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (Winner of a 1992 Christopher Award), New York, Toronto, London, Sydney, Auckland, Bantam Books.

dikotomi tetapi merupakan dua sisi pada suatu mata uang. menurut Lickona, kualitas manusia dibentuk dari kapasitas intelektual seseorang yang dapat berkembang hanya jika memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain melalui "*respect and responsibility*".

Pendidikan karakter berkembang sejalan dengan perspektif pemikiran yang berubah akibat adanya perubahan sosial sepanjang sejarah kemanusiaan. Perubahan sosial itu berkembang lambat pada paruh pertama abad ke-20, tetap berlangsung cepat pada paruh kedua. Pada tahun 1960-an berkembang sebuah perspektif yang disebut "*personalism*" yang dapat diartikan: "*.....celebrated the worth, dignity, and outonomy of individual person, including the subjective self or inner life of the person. It emphasized rights more than responsibility, freedom more than commitment*". Perspektif ini menjadikan manusia lebih ego-centris yang termotivasi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagai individu yang bebas, ketimbang memenuhi kewajiban mereka sebagai bagian dari kelompok masyarakat, seperti keluarga, agama, masyarakat, dan Negara.

Berkembangnya perspektif ini telah memunculkan berbagai permasalahan. Manusia lebih menaruh perhatian pada berbagai kendala terhadap kebebasan masing-masing, sehingga kebebasan perorangan telah berkembang melewati batas-batas yang tidak wajar. Akibatnya, muncul benih-benih sikap dan perilaku yang merugikan nilai-nilai kehidupan bersama sebagai masyarakat atau bangsa, seperti permusuhan, perebutan kekuasaan, tidak menghormati otoritas, penyalahgunaan wewenang, dan sejenisnya. Perspektif ini telah menyebabkan pendidikan karakter mengalami degradasi bahkan mulai dipertanyakan manfaatnya dalam menumbuhkan warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.

Pendidikan karakter menurut perspektif *personalism* berbeda dengan pendidikan karakter pada masyarakat yang mementingkan kepentingan Negara di atas segalanya. Pada masyarakat ini, pendidikan karakter bukan bertujuan membentuk kualitas dan produktivitas manusia, tapi menciptakan ketertiban dan keamanan (*law and order*). Dalam perspektif ini pendidikan karakter lebih indoktrinatif untuk menciptakan kepatuhan terhadap Pemerintah. Walaupun dalam jangka pendek tampak berhasil, pendidikan karakter seperti ini belum terbukti ampuh dalam mewujudkan manusia sebagai agen perubahan. Setiap manusia menyandarkan nasibnya terhadap negara, karena tidak yakin bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk mensejahterakan diri mereka sendiri.

Dalam perkembangan berikut, pendidikan nilai di sekolah berkembang dalam perspektif "*values clarification*", yang diperkenalkan oleh Profesor dari New York University Louis Rath (1966).<sup>4</sup> Menurut Rath, "*The idea that adults should directly instruct children in right and wrong, or even try to influence students 'value position', was explicitly rejected.*" Menurut perspektif ini, nilai moral dan karakter tidak dapat diajarkan secara konvensional. Guru di sekolah harus membantu siswa untuk belajar bagaimana cara belajar dan memahami makna dari suatu nilai karakter. Tidak seharusnya dibedakan antara apa yang ingin dilakukan (*want to do*) dengan apa yang seharusnya dilakukan (*ought to do*) oleh siswa. Tidak ada keharusan untuk seseorang memiliki suatu nilai, karena tidak ada definisi yang ajeg bahwa suatu nilai karakter lebih baik atau lebih buruk dari nilai yang lain. Untuk memahami apakah nilai-nilai itu baik atau buruk tergantung kepada pemahaman siswa terhadap manfaat dari nilai-nilai tersebut bagi kehidupan dirinya dan orang lain.

#### 4. Karakter dalam Epistemologi

Kebanyakan orang seperti para pejabat pendidikan, politisi, penceramah, dan yang lainnya, sering berbicara tentang karakter. Para psikolog sering menggunakan kata kepribadian (*personality*) untuk pengertian yang juga mirip dengan karakter. Namun para pemikir di bidang etika sejak dua ratus tahun terakhir, belum terlalu banyak menggunakan kata karakter.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Rath, Louis, M. Harmin, and S. Simon (1966), *Values and Teaching*, Columbus, OH; Charles E. Merrill Publishing Co.

<sup>5</sup> Joel J. Kupperman, *Character*, New York: Oxford University Press, 1991, hlm. v.

Para pemikir Eropah membuat tesis bahwa karakter adalah konsep yang paling inti dari etika, dan mencoba memasukkan tesis ini ketika merestrukturisasi teori filosofi etis. Kata karakter<sup>6</sup> berasal dari bahasa Yunani yang berarti sebuah instrumen untuk menilai, mengesankan, memberikan tanda khusus, dan watak khusus.<sup>7</sup> Tanda khusus ini adalah yang membedakan dari yang lain sehingga dapat mengukir kesan khusus. Kata karakter juga sering diganti dengan kata kepribadian (*personality*), walaupun keduanya memiliki konotasi yang berlainan. Para psikolog hampir tidak pernah menggunakan istilah “karakter”, karena karakter lebih bersifat *inner value* dan lebih berkonotasi *morality* dibandingkan kepribadian. Kata *personality* sendiri diartikan sebagai kualitas atau kumpulan dari kualitas yang membuat seseorang menjadi berbeda dari orang yang lain, *quality or assemblage of qualities which makes a person what he is, as distinct from other person*.<sup>8</sup>

Beberapa pemikir di bidang karakter, sangat berhati-hati ketika memulai diskusi dan menulis tentang karakter. James Arthur misalnya telah mengawali tulisannya dengan mengingatkan bahwa memulai diskusi tentang karakter atau pendidikan karakter berarti memasuki arena pertentangan yang cukup mendasar berkaitan dengan definisi dan ideologinya. Arthur<sup>9</sup> menemukan banyak perbedaan pandangan yang cukup fundamental, walaupun tetap ada kesepakatan banyak pihak bahwa karakter adalah sesuatu yang penting dan menentukan.

Bagaimana mendefinisikan karakter? Apakah karakter itu muncul karena kebiasaan seseorang yang kemudian dapat membentuk karakter? Perspektif Marxisme lebih menganggap karakter sebagai sebuah entitas cair (*liquid entity*) yang lebih banyak ditentukan oleh suatu kekuatan struktur lingkungan. Menurut perpektif Calvinist, karakter adalah sebuah orientasi yang tidak berubah karena digariskan oleh Tuhan. Perpektif Liberalis sekuler yang telah lama mendominasi teori pendidikan, karakter dapat dirubah dan dimodifikasi atas dasar diskusi dan persuasi dalam yang juga berubah. Pendidikan karakter sejatinya dianggap sebagai upaya multidisipliner yang membutuhkan penganut (pro) dan kritikus (contra) yang dapat melahirkan pemikiran alternatif dan menerapkan metode yang berbeda menuju dan untuk mendekati pelaku.<sup>10</sup> Permasalahan karakter manusia di berbagai negara dewasa ini menjadi perhatian serius para pemerhati moral dan nilai. Terutama para pemikir Barat, mereka sibuk mencari model-model pengembangan karakter yang mereka harapkan bisa menjadi solusi sementara bagi permasalahan pelik yang sedang mereka hadapi.

Thomas Lickona menyusun sejumlah indikator yang berkaitan dengan permasalahan moral remaja diantaranya ketidakjujuran, kekejaman sebaya, rasa tidak hormat kepada orang dewasa dan orang tua, *self-centredness*, perilaku merusak diri sendiri, dan tidak memahami etika.<sup>11</sup> Sementara itu Altruisme (sifat mementingkan kepentingan orang lain) sering digunakan sebagai pengecualian. Relativisme moral sering dipersalahkan oleh pendidik karakter karena dianggap sebagai penyebab kerusakan moral.<sup>12</sup> Relativime moral diklaim telah menggantikan keyakinan pada tanggung jawab pribadi dengan dalih sebagai sebab-akibat sosial. Semua indikator sosial di atas telah digunakan secara meluas sejak tahun 1960 dan telah dapat mengukur dengan jelas<sup>13</sup> bahwa berbagai persoalan muncul dengan sangat cepat. Gertrude Himmelfarb<sup>14</sup> merincikan bagaimana statistik telah mencatat penurunan berbagai penyakit sosial di Inggris pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 --seperti kriminalitas, mabuk, perbuatan haram (*illegitimacy*), kemiskinan, pergelandangan. Namun statistik tersebut telah gagal mencatat munculnya masalah lain seperti perceraian, narkoba, prostitusi remaja dan bunuh diri.

<sup>6</sup> kamus besar *Oxford English Dictionary OED*),

<sup>7</sup> Joel J. Kupperman, *Character*, New York: Oxford University Press, 1991, hlm. 3.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 5

<sup>9</sup> James Arthur, *Education with Character, The moral economy of schooling*, London: RoutledgeFalmer, 2003, hlm. 1.

<sup>10</sup> James Arthur, *Ib-id*.

<sup>11</sup> Joel J. Kupperman, *Character*, New York: Oxford University Press, 1991, hlm. 94.

<sup>12</sup> W. Kilpatrick, *Why Johnny Can't Tell Right From Wrong: Moral Literacy and the Case for Character Education*, New York: Simon & Schuster, 1992, hlm. 13f.

<sup>13</sup> Dari bacaan singkat *British Social Trends*

<sup>14</sup> Gertrude Himmelfarb, *The Demoralization of Society: From Victorian Virtues to Modern Values*, New York: Alfred A. Knopf, 1995, hlm. 222.

Sekolah disepakati menjadi tempat yang berkontribusi pada tumbuh-kembangnya moral dan karakter. Di Amerika, 80% dari negara bagian memiliki misi pendidikan karakter. Menurut dokumen Public Agenda (1994), negara-negara bagian tersebut mencoba mengikuti harapan publik bahwa sekolah menjadi tempat di mana anak-anak memperoleh pendidikan dan pembentukan nilai seperti kejujuran (97%), saling menghargai (94%), demokrasi (93%), dan menghormati orang-orang yang berbeda ras dan latar belakang (93%).<sup>15</sup>

## 5. Mewujudkan Sekolah sebagai Institusi Karakter

Dalam pendidikan nilai, sekolah sebagai institusi pendidikan perlu menciptakan nilai-nilai moral dan budaya sekolah. Janet Brodesser, seorang guru pada distrik Brockport New York, USA, mengatakan bahwa *"if we want our students to take moral education seriously, the school itself must be a moral institution."*<sup>16</sup> Bagaimana budaya moral memberikan efek terhadap karakter siswa ditemukan dalam penelitian Psikolog Clark Power, Ann Higgins, and Lawrence Kohlberg (1989) bahwa: *"When a high school strives to be a 'just community', students see the schools as being governed by high-stage moral norms. Under that condition students bring into play their highest level of moral reasoning when ask how they would solve an everyday school-related moral dilemma."*<sup>17</sup> Moral dan karakter tidak dapat dibentuk dalam suatu ruang hampa (*vacuum tube*) tetapi harus bersatu dalam denyut nadi kehidupan manusia, termasuk sekolah. Sekolah adalah lingkungan kehidupan sehari-hari, sehingga praktek-praktek, tindakan, dan perilaku keseharian baik secara individual maupun kelompok akan memberikan efek langsung terhadap pembentukan karakter. Sekolah harus menciptakan suatu *setting* kultur sekolah, yaitu *setting* kehidupan bersama agar menjadi lingkungan bersama untuk tumbuhnya kemampuan rasional, nilai, sikap, tindakan, dan perilaku siswa kearah yang diinginkan.

Dalam kaitan itu, Lickona (1992) menawarkan enam elemen utama untuk proses pembentukan kultur moral di dalam sekolah yang dapat menumbuhkan nilai, sikap dan perilaku positif bagi siswa. Keenam elemen tersebut adalah sebagai berikut.

1. *moral and academic leadership from the principal;*
2. *schoolwide discipline that models, promotes, and upholds the school's values in all school environment;*
3. *a schoolwide sense of community;*
4. *students government that involves students in democratic self-government and fosters the feeling "this is our school, and we are responsible for making it the best school it can be";*
5. *a moral atmosphere of mutual respect, fairness, and cooperation that pervades all relationship those among the adults in the school as well as those between adults and students; and*
6. *elevating the importance of morality by spending school time on moral concerns"*<sup>18</sup>

Menurut Lickona, kemajuan dalam salah satu elemen akan memberikan pengaruh terhadap kemajuan dalam elemen lain. Namun, untuk dapat menciptakan kultur moral yang berguna dalam menumbuhkan karakter, sekolah tidak perlu memiliki kekuatan penuh pada seluruh elemen tersebut di atas.

*Pertama*, kepala sekolah yang efektif adalah pelopor dalam pendidikan karakter dan senantiasa terlibat penuh dalam program pendidikan karakter di sekolah yang dipimpinnya. Pendidikan karakter tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada guru (misalnya guru PKN, Agama, atau kepribadian) karena semua guru harus menjadi bagian integral dari program pendidikan karakter. Dalam menciptakan kultur yang kondusif, kepala sekolah mengatur dan

<sup>15</sup> Larry P. Nucci dan Darcia Narvaez, *Handbook of Moral and Character Education*, New York: Routledge, 2008, hlm. 1.

<sup>16</sup> Thomas Lickona (1992), op-cit. halaman 323.

<sup>17</sup> Clark Power, Ann Higgins, and Lawrence Kohlberg (1989), *Lawrence Kohlberg's Approach to Moral Education.*, New York, Columbia University Press.

<sup>18</sup> Thomas Lickona (1992) op-cit, halaman 325.

memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan yang mendorong terciptanya kultur sekolah yang memungkinkan tumbuhnya karakter. Kegiatan tersebut di antaranya adalah: workshop, diskusi antar-guru, pengembangan kurikulum dan pengajaran, gerakan kebersihan sekolah, kegiatan ibadah, pembinaan organisasi siswa, penegakan disiplin, pertandingan olahraga, perlombaan kesenian, penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, memberikan tauladan, dan sejenisnya.

Pendidikan karakter adalah tanggung jawab kepala sekolah dalam fungsinya sebagai pengatur, pengelola, serta fasilitator kegiatan sekolah secara sistematis dan terprogram. Dalam pendidikan karakter, kepala sekolah mendayagunakan seluruh potensi SDM seperti guru, staf administrasi, orangtua siswa, petugas perpustakaan, petugas kafetaria, dan sebagainya. Kepala sekolah harus kompeten dalam *leadership* yang memahami dan mampu mengendalikan mutu kehidupan sekolah secara menyeluruh dalam perspektif karakter. Kepala sekolah tidak mungkin mampu mengendalikan pengaruh lingkungan di luar sekolah yang berdampak pada karakter siswa, tetapi yang pasti kepala sekolah sebagai *leader* harus mampu mengontrol lingkungan sekolahnya sendiri, seperti dikatakan Carl Campbell<sup>19</sup> bahwa "*We may not be able to control his environment elsewhere, but we can control the environment here.*" Kepala sekolah harus kompeten dalam menggerakkan seluruh dimensi yang terkait dengan kultur moral dan karakter sekolah. Setiap petugas yang melaksanakan peran masing-masing bertanggungjawab terhadap, dan akan memperoleh *reward* and *punishment* dari, kepala sekolah. Pada gilirannya, kepala sekolah harus bertanggungjawab sepenuhnya atas efektivitas kultur sekolah yang diciptakannya untuk menumbuhkan moral dan karakter.

*Kedua*, tegaknya disiplin sekolah mampu menciptakan sekolah sebagai suatu institusi moral. Dalam bukunya yang berjudul "*The Fifteen Thousand Hours*" seorang peneliti dari Inggris Michael Rutter (1979)<sup>20</sup> mengungkap temuan penelitian terhadap 2700 siswa SD yang berusia 10 tahun di London yang beresiko tinggi untuk menjadi anak-anak nakal, sebagai berikut: "*...if an at-risk child subsequently went to a high school with poor order and discipline, there was a 48 percent probability that the child would become a juvenile delinquent. But if a child went to a high school with good order and discipline, the probability of delinquency dropped dramatically, to only 9 percent.*" Dari temuan Rutter, betapa penting disiplin sekolah ditegakkan agar berdampak signifikan terhadap tumbuhnya karakter siswa, sehingga terhindar dari *juvenile delinquency*.

Disiplin sekolah mengajarkan kepada siswa bahwa kehidupan di sekolah adalah milik bersama, dan menciptakan *shared values* antar-warga sekolah yang bersangkutan. Untuk tegaknya disiplin sekolah diperlukan aturan-aturan yang dibuat dan difahami bersama, agar dipatuhi bersama. Jika seorang siswa tidak mematuhi aturan, maka ia bukan merupakan bagian dari kebersamaan itu. Setiap aturan sekolah yang dibuat harus diyakini memiliki kegunaan dalam mencegah tindakan dan perilaku warga sekolah yang mengandung unsur-unsur *delinquent*, penyimpangan, pergaulan bebas, permusuhan, keributan, perkelahian, serta perilaku tidak terpuji lain yang dapat mengganggu dirinya maupun orang lain. Cara ini sering disebut strategi *mainstreaming*, yaitu menanamkan rasa bangga sebagai anak yang berkarakter.

*Ketiga*, rasa kekeluargaan di sekolah merupakan salah satu cara terbaik untuk mencegah perilaku tidak terpuji yang mudah berkembang jika ikatan kekeluargaan di sekolah lemah dan norma-norma positif sekolah tidak diindahkan. Di sekolah-sekolah daerah perkotaan, sering terjadi friksi antar-kelompok siswa yang memiliki perbedaan dalam status sosial-ekonomi, suku bangsa, ethnic, agama, dan variable pembeda lain yang berpotensi menimbulkan konflik. Menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut Winkelman<sup>21</sup> berhasil menerapkan model "*a cohesive and caring school community*". Dengan model kekeluargaan ini, Winkelman berhasil menciptakan image "*community building*" antar-siswa yang akan menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, saling membantu, mengucapkan selamat kepada temannya yang

<sup>19</sup> The principal of Dry Creek Elementary School, California yang telah berhasil dalam menciptakan kultur moral sekolah dengan kompetensinya sebagai leader di sekolah tersebut.

<sup>20</sup> Thomas Lickona (1992) op-cit

<sup>21</sup> Lickona (1992) op-cit halaman 335

memperoleh keberuntungan, berempati kepada teman yang mendapat musibah, mendengar keluhan, dan sebagainya. Rasa kekeluargaan dapat ditumbuhkan melalui Kegiatan ekstra kurikuler, atau kegiatan lain yang dapat menumbuhkan perasaan beruntung karena menjadi bagian dari keluarga sekolah. Kegiatan-kegiatan seperti pertandingan olahraga, perlombaan kesenian, perlombaan kebersihan lingkungan, kegiatan usaha, dan pekerjaan di sekolah adalah bentuk-bentuk kegiatan ekstra-kurikuler yang dapat mempertebal rasa kekeluargaan.

*Keempat*, adalah demokrasi dalam pengelolaan sekolah yang dapat menumbuhkan karakter dengan melibatkan siswa dalam mengelola kehidupan sekolah. Power, Higgins, dan Kohlberg melakukan studi dengan melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan besar di sekolah. Melalui perlibatan ini, siswa merasa bahwa dirinya adalah bagian integral dari sekolah, atau setidaknya mereka dapat memahami sejak awal setiap keputusan sekolah. Dengan strategi ini siswa akan merasa bertanggungjawab untuk mematuhi dan mengikuti setiap kebijakan atau aturan sekolah tersebut. Untuk itu, organisasi siswa (OSIS) merupakan sarana ampuh untuk menumbuhkan rasa keterlibatan siswa baik dalam pengelolaan kegiatan siswa, maupun pengelolaan sekolah secara keseluruhan. Pengalaman yang diperoleh Dr. Shaheen<sup>22</sup> pada Cottage Lane Elementary School di Blauvelt, New York, diperoleh kesimpulan bahwa: “...the total school environment reflect the principle of democratic, pluralistic society based on the rule of law.” Mengikutsertakan siswa dalam penyusunan, pelaksanaan, penegakan, serta perubahan aturan-aturan sekolah mutlak diperlukan untuk terbentuknya iklim demokratis di sekolah, yang akan memberikan efek langsung terhadap pembentukan karakter.

*Kelima*, menciptakan kejasama yang erat antar-orang dewasa diperlukan sebagai kekuatan moral dan intelektual untuk tumbuhnya karakter positif. Kekeluargaan antar-guru diciptakan untuk menumbuhkan semangat kolegialitas, tukar gagasan, tukar pengalaman terbaik (*best practices*), serta saling membantu dalam pemecahan masalah pembelajaran siswa. Untuk menciptakan kondisi tersebut kepala sekolah sebagai pemimpin mengatur dan memfasilitasi serta memberikan dukungan administrasi agar kegiatan tersebut terlaksana secara teratur dan berkelanjutan. Di dalam suatu sekolah yang efektif, guru dan tenaga kependidikan lainnya dapat bekerjasama dalam menyusun dan merumuskan kebijakan sekolah, memperbaiki kualitas pembelajaran, memilih buku pelajaran, memperkuat disiplin sekolah, serta menciptakan program-program yang efektif untuk pengembangan karakter.

*Keenam*, adalah menyisihkan waktu untuk menangani masalah-masalah moral dalam kehidupan sekolah, dari mulai hal kecil sampai dengan hal yang besar. Berdasarkan pengalaman di banyak *school district*, tidak pernah ada cara cepat dan segera untuk menciptakan iklim positif yang dapat menumbuhkan karakter. Hal-hal besar yang berkaitan dengan kebijakan atau manajemen sekolah belum dapat menjamin bahwa nilai-nilai dan tindakan positif akan tumbuh seketika di antara siswa. Karakter positif dalam suatu kehidupan sekolah dibentuk dari perilaku individu dan kelompok melalui capaian-capaian kecil yang praktis dan bersifat incremental. Oleh karena itu, kepala sekolah dan guru perlu menyisihkan waktu untuk memikirkan hal-hal kecil serta cara-cara praktis dalam kehidupan sekolah yang mampu memfasilitasi tumbuhnya karakter, seperti kebersihan diri, kebersihan lingkungan, memelihara ruang kelas, memelihara rumput dan taman sekolah, “*lost and found table*”, penyediaan tempat ibadah, dan sejenisnya.

## 6. Pendidikan Karakter di Sekolah

Di Amerika Serikat telah berkembang sejumlah program pendidikan, mata pelajaran, mata kuliah, literatur, dan materi kurikulum pendidikan karakter. Pemerintah Partai Buruh di Inggris, dengan etosnya yang sangat moralistik juga telah mengambil peran tersebut. *Civic education* telah dikembangkan dan dijadikan sebagai mata pelajaran wajib sebagaimana ditekankan dalam *Green Paper, Schools: Building on Success* (Februari 2001), dan *White Paper, Schools: Achieving Success* (September 2001). Dalam dokumen yang terakhir dibahas secara panjang lebar

<sup>22</sup> Lickona (1992) ib-id halaman 358

mengenai *'education with character'*. Tujuannya adalah menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai tertentu agar menjadi prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman, baik bagi perilaku siswa maupun para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan secara demokratis. Hal ini terkait erat dengan kewarganegaraan.<sup>23</sup>

Terry McLaughlin dan Mark Halstead<sup>24</sup> Menggunakan berbagai isu kontemporer untuk dibahas dalam pendidikan karakter di Amerika Serikat. Guru-guru di Amerika memulai pendidikan karakter dengan merinci penyakit-penyakit sosial masyarakat yang kemudian menggunakan pendidikan karakter sebagai remedial. Mereka percaya bahwa nilai-nilai karakter dapat diidentifikasi, diuji, dan diajarkan di sekolah. Pendidik karakter harus mencari bentuk pembelajaran yang paling eksplisit di sekolah agar kebajikan, moral, watak, sifat dan kebiasaan dapat ditanamkan secara terukur. Keteladanan guru di dalam iklim sekolah yang kondusif juga dibutuhkan agar pendidikan karakter dapat berhasil dalam merubah perilaku siswa. Pendidik karakter tidak perlu mengajar konsep moral kepada siswa sampai pada suatu waktu para siswa dapat mendefinisikan dan memaknai perilaku karakter dengan sendirinya. McLaughlin dan Halstead mengkritik pendidikan karakter yang terlalu sempit terkait dengan perilaku moral tertentu yang langsung diajarkan secara tradisional, karena pendidikan karakter yang berhasil adalah program yang menekankan pada pengembangan kemampuan kritis para siswa.

Maka akhlak *Laa Ilaaha Illallaah* sebagai kumpulan nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan memasuki individu manusia dan merekonstruksi visi, membangun mentalitas, serta membentuk akhlak dan karakternya. Demikianlah, *Laa Ilaaha Illallaah* sebagai kumpulan nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan memasuki masyarakat manusia dan mereformasi sistem, serta membangun budaya dan peradabannya. Walaupun Islam merinci satuan akhlak terpuji, namun dengan pengamatan mendalam, kita menemukan satuan tersebut sesungguhnya mengakar pada induk karakter tertentu. Sedangkan akhlak tercela seperti penyakit syubhat dan syahwat, sama bersumber dari kelemahan akal dan jiwa.<sup>25</sup>

Di dalam pengembangannya perlu diperhatikan tahapan berikut dalam membuat model-model pengembangan karakter yang mengikuti perkembangan perilaku manusia, yakni Tahap I (0-10 tahun) yang disebut perilaku lahiriyah dimana metode pengembangannya adalah pengarahan, pembiasaan, keteladanan, penguatan (imbalan) dan pelemahan (hukuman), serta indoktrinasi. Tahap II (11-15 tahun) merupakan perilaku kesadaran, metode pengembangannya adalah penanaman nilai melalui dialog, pembimbingan, dan pelibatan. Pada tahap III (15 tahun ke atas) menjadi tahap kontrol internal atas perilaku, metode pengembangannya adalah perumusan visi dan misi hidup, dan penguatan tanggung jawab kepada Allah Swt.<sup>26</sup> Tentunya pembagian tahapan ini lebih kepada psikologi dan tumbuh kembang manusia, karena jika merujuk pada fiqh tentunya menggunakan tahapan yang berbeda.

## 7. Tahap-Tahap Perkembangan Karakter Siswa

Tumbuhnya moral dan karakter ditentukan oleh tahap-tahap perkembangan kognitif seseorang dari mulai tahap yang paling sederhana sampai dengan tahap yang paling kompleks. Kohlberg (1978) membagi tiga tingkatan hirarkis dalam perkembangan karakter, dengan tahap-tahap sebagai berikut.

*"The first level, Pre-conventional Reasoning; is the lowest level of moral development. Children functioning at this level show no internalization of moral values; moral reasoning is controlled by external reward and punishment. Conventional reasoning, the second level, encompasses individuals who have internalized certain standards, but the standards are those of others (parents, societal laws). Third level of*

<sup>23</sup> James Arthur, *Education with Character, The moral economy of schooling*, London: RoutledgeFalmer, 2003, hlm. 2.

<sup>24</sup> Terry H. McLaughlin, dan J.M. Halstead, 'Education in character and virtue', dalam J.M Halstead and T.H. McLaughlin (eds) (1999), *Education and Morality*, London: Routledge, 1999, hlm. 193.

<sup>25</sup> Muhammad Anis Matta, *Membentuk Karakter Cara Islam*, Jakarta: Al-I'tishom, 2002, Cet. ke-3

<sup>26</sup> *ibid.*

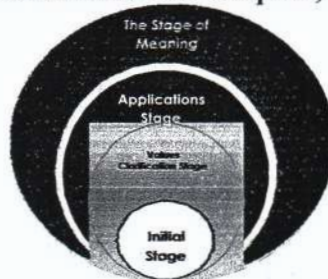
*moral development is Post-conventional Reasoning that have completely internalized moral standards and no longer reason based upon others. Standards.*"<sup>27</sup>

Kohlberg yakin bahwa moral dan karakter adalah produk dari tumbuhnya kemampuan rasional kognitif seseorang. Pendidikan karakter yang tertinggi tingkatannya adalah artikulasi penalaran manusia untuk memahami kemanfaatan dari nilai moral dan karakter dalam konteks kehidupan mereka. Menurut Kohlberg, pendidikan karakter dapat berhasil dilakukan dalam lingkungan masyarakat yang berkeadilan, seperti pemerataan dalam berpartisipasi, rasa memiliki terhadap keputusan bersama, serta tumbuhnya penalaran dan argumentasi moral sebagai paradoks dari cara-cara yang otoritatif.

Dalam kaitan dengan Kohlberg, Marlene Lockheed and Andrian Verspoor (1990) menawarkan empat tahap dalam mengembangkan mutu pendidikan, termasuk dalam kaitannya dengan perkembangan karakter anak sekolah dasar. Pendidikan karakter dapat menggunakan model pemikiran Lockheed dalam tahap-tahap pengembangan kualitas sekolah yang secara prinsip diterapkan pada perkembangan karakter siswa. Marlene Lockheed(1990)<sup>28</sup> dalam bukunya "*Improving Primary Education in Developing Countries*", mengungkapkan bahwa pendidikan dasar esensinya merupakan suatu institusi yang menanamkan landasan untuk tumbuhnya karakter siswa sebagai warga negara. Karakter hanya dapat ditumbuhkan setelah melalui tiga tahap, yaitu: *Initial Stage*; *Formal Stage*; dan *Transitional Stage*. Tahap yang terakhir, disebut "*the Stage of Meaning*", sebagai dampak kumulatif tumbuhnya karakter peserta didik.

Kohlberg dengan tahap-tahap perkembangan siswa dan Marlene dengan tahap-tahap peningkatan mutu pendidikan, dapat disintesis dalam kerangka pembentukan karakter. Sintesa tersebut dapat digambarkan melalui pentahapan yang ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut.

Gambar  
Tahap-Tahap Perkembangan Menuju Terbentuknya Karakter  
(Diadopsi dari Marlene Lockheed & Verspoor, 1990, dan Kohlberg, 1992)



Karakter tertinggi yang dapat dicapai siswa adalah jika sudah mencapai tahap keempat, yaitu *the stage of meaning*. Pada tahap ini, karakter siswa dimungkinkan untuk berkembang secara berkelanjutan karena sudah melewati perjalanan yang panjang, cermat, dan melelahkan. Untuk mencapai tahap tertinggi perkembangan karakter, siswa harus melewati tahap-tahap sebagai berikut.

a. *Initial Stage of character building*; adalah keadaan pada waktu siswa belum memiliki kemampuan memahami "right" and "wrong" (*manner*), sehingga anak-anak cenderung melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Oleh karena itu, yang lebih tepat dilakukan dalam Pendidikan karakter pada tahap ini adalah "pembiasaan" (*habituation*), tanpa harus memahami mengapa mereka harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Cara yang harus dilakukan, tidak semata-mata melalui "perintah" atau "larangan" tetapi pembiasaan yang akan berdampak baik secara sikap-mental, maupun juga secara fisikal. Jika anak sudah terbiasa untuk melakukan sesuatu, maka kebiasaan tersebut akan menimbulkan kebutuhan

<sup>27</sup> Kohlberg, L. (1978) *Revisions in the Theory and Practice of Moral Development*. New York: Wiley.

<sup>28</sup> Marlene Lockheed Andrian Verspoor(1990) *Improving Primary Education in Developing Countries, A Review of policy Options*.

bahkan ketergantungan baik secara mental maupun secara fisik. Contoh, kebiasaan merokok sejak kecil akan menyebabkan merokok menjadi suatu kebutuhan bahkan ketergantungan secara psikologis bahkan secara fisik.

- b. *Values Clarification Stage*; adalah tahap perkembangan di mana siswa mulai memahami berbagai gejala yang diamatinya dan bagaimana kemampuan rasional dapat memahami alasan mengapa anak harus memiliki nilai, bersikap atau berperilaku *manner* tertentu. Pada tahap ini diberikan pemahaman terhadap siswa, agar mereka dapat menjelaskan gejala dan permasalahan moral dan karakter secara rasional. Dalam tahap perkembangan ini *values clarification* berfungsi terutama untuk menjelaskan pentingnya atau bahayanya mereka memiliki nilai, sikap, dan perilaku tertentu yang diinginkan. Anak perlu memahami dengan nalar bahwa merokok itu berbahaya untuk kesehatan, anak juga perlu memahami secara nalar akibat-akibat jika tidak mematuhi aturan sekolah atau norma dalam masyarakat, dan sebagainya.
- c. *Application Stage*; pada tahap ini siswa dilibatkan dalam kegiatan atau aplikasi atas pembiasaan dan pemahaman mengenai karakter di dalam situasi yang nyata di sekolah, misalnya melalui aplikasi pendidikan berbagai bentuk kecakapan hidup (*life skill education*). Mereka dilibatkan dalam berbagai kegiatan nyata dalam rangka menerapkan nilai, sikap dan perilaku sebagai karakter yang terpuji, misalnya melalui upacara bendera untuk mempertebal kecintaan terhadap negara dan bangsa, iuran untuk kegiatan bersama antar-siswa, sebagai aplikasi dari tanggungjawab seorang warga organisasi siswa; membersihkan meja belajar sendiri setiap harinya sebelum pulang; membersihkan dan memelihara keindahan kelas sebagai tanggungjawab bersama; dan sebagainya.
- d. *Stage of Meaning*; adalah tahap akhir di mana siswa mampu merasakan arti (*meaning*) dari nilai, sikap dan perilaku positif yang telah difahami dan dilakukannya selama ini, baik dalam hal yang berkaitan atau tidak dengan pembelajaran. Tahap ini memiliki dampak jangka panjang, dan jika sudah mampu mencapai tahap ini, siswa dapat memperoleh suatu nilai yang melembaga (*institutionalized values*) serta dapat merasakan manfaat dari apa yang mereka lakukan. Kondisi inilah yang ingin diciptakan oleh proses pendidikan karakter yang bermutu karena akan menjadi dasar untuk tumbuh dan berkembangnya karakter. Tahap “meaning” ini seharusnya menjadi tahap paling menentukan dalam setiap proses pendidikan dasar yang bermutu yang akan menjadi landasan untuk tumbuhnya karakter dan kepribadian, secara berkelanjutan.

## 8. Kesimpulan dan Implikasinya

Pendidikan karakter sama sekali bukan mata pelajaran atau mata kuliah yang dapat disampaikan melalui proses pembelajaran akademik. Jika kita mulai berfikir pendidikan karakter itu dilaksanakan melalui mata-pelajaran atau mata-kuliah, di manapun juga, pada saat itu pula kita harus sudah siap mental bahwa pendidikan karakter seperti itu tidak akan pernah berhasil. Yang pasti, pendidikan karakter adalah suatu proses pendidikan yang berlangsung baik dalam institusi pendidikan formal, non-formal, maupun informal melalui keluarga atau masyarakat. Pendidikan karakter adalah proses yang secara sistematis disusun dan dilaksanakan di dalam suatu satuan pendidikan melalui proses yang sengaja diciptakan maupun proses yang berlangsung secara nyata walaupun tidak disengaja tetapi berpengaruh terhadap terbentuknya karakter.

Karakter tidak hanya tumbuh dan berkembang pada setiap individu siswa atau guru atau lainnya, tetapi juga dapat dimiliki oleh suatu institusi pendidikan atau institusi lainnya. Karakter siswa tidak mungkin tumbuh-kembang melalui sekolah yang tidak berkarakter. Hanya pada institusi pendidikan yang berkarakterlah, karakter peserta didik akan tumbuh dan berkembang secara wajar dan terarah. Sekolah yang berkarakter memiliki beberapa ciri, baik dilihat dari pemimpinnya, organisasi siswanya, iklim sekolahnya, tatanan masyarakatnya, serta manajemen pendidikannya di sekolah yang mampu membentuk perilaku warganya untuk berperilaku sesuai

dengan norma dan standar karakter yang dianut.

Karakter siswa dapat dikembangkan secara bertahap sesuai dengan tahap-tahap perkembangan siswa seperti yang dikemukakan oleh Kohlberg, yang dimulai sejak tahap pra-rasional, tahap rasional, dan tahap pasca rasional. Pada tahap pra-rasional Siswa belum menjiwai norma dan standar; Perilaku moral lebih dikendalikan oleh pembiasaan bahkan mungkin pemaksaan. Jika siswa sudah mencapai tahap rasional, perilaku moral dan karakter dibentuk didasarkan atas pemahaman akan norma yang berlaku pada orang lain (orangtua, aturan sosial). Pada tahap ketiga, Siswa memahami dan menjiwai norma dan standar moral, dan perilaku moral & karakter karena didorong oleh keinginannya sendiri. Atas dasar itu, pembentukan moral harus dilakukan seiring dengan tahap-tahap tersebut.

Jika tahap-tahap perkembangan Kohlberg itu diadaptasikan terhadap strategi peningkatan mutu pendidikan yang dikemukakan oleh Lockheed, maka moral dan karakter dapat ditumbuhkan dengan empat tahap, yaitu: tahap keteladanan, Pembiasaan, bila perlu Pemaksaan; tahap Pemahaman siswa akan pentingnya norma & standar moral dan karakter; tahap melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah untuk melatih mematuhi norma, aturan, dan tanggungjawab; dan tahap menjiwai norma dan standar, dan perilaku karakter dilaksanakan atas dasar motivasi instrinsik.

Atas dasar tahap-tahap perkembangan moral dan karakter tersebut, maka program pendidikan karakter di sekolah paling tidak harus dilaksanakan secara sistematis melalui dua pendekatan sekaligus, yaitu: pembentukan karakter sekolah sebagai institusi, dan pendidikan karakter untuk siswa secara individual.

*Pertama*, dalam pembentukan karakter institusi sekolah, penataan dapat dilakukan dalam enam komponen yang meliputi: penyusunan indikator kehidupan sekolah yang berkarakter, kepemimpinan moral & akademik kepala sekolah, menerapkan disiplin sekolah yang berkeadilan, iklim sekolah yang berkeadilan, harmonis, "*mutual respect*", organisasi kesiswaan yang demokratis, diskusi permasalahan karakter di sekolah, dan rasa kekeluargaan dan kebersamaan di sekolah.

*Kedua*, dalam pembentukan karakter siswa, suatu program pendidikan karakter di sekolah perlu dikembangkan secara terprogram yang meliputi: program Pembiasaan, "Pemaksaan," Keteladanan; program Pemahaman Nilai dan Norma; program Aplikasi dalam Kegiatan/Kehidupan Sekolah; dan program Pemaknaan Nilai dan Norma moral dan karakter.

Untuk dapat terlaksananya kedua pendekatan tersebut perlu dikembangkan buku pedoman untuk sekolah, guru dan kegiatan siswa yang perlu disusun melalui pemodelan dan ujicoba di sekolah-sekolah. Setelah ujicoba dilakukan evaluasi agar program yang disusun benar-benar sesuai dan dapat diaplikasikan. Jika pedoman tersebut telah diperbaiki, selanjutnya dilakukan pelatihan kepala sekolah agar dapat meningkatkan mutu manajemen sekolah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkembangnya karakter. Diperlukan juga pelatihan untuk guru-guru dan siswa agar dapat menyelenggarakan langkah-langkah pembelajaran untuk menumbuhkan karakter siswa, baik melalui pembelajaran di kelas, di dalam pergaulan sekolah, maupun di dalam keluarga yang disesuaikan dengan pendidikan di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arthur, James, *Education with Character, The moral economy of schooling*, London: RoutledgeFalmer, 2003.
- Himmelfarb, Gertrude, *The Demoralization of Society: From Victorian Virtues to Modern Values*, New York: Alfred A. Knopf, 1995.
- Kilpatrick, W., *Why Johnny Can't Tell Right From Wrong: Moral Literacy and the Case for Character Education*, New York: Simon & Schuster, 1992.
- Kupperman, Joel J., *Character*, New York: Oxford University Press, 1991.

- Lickona, Thomas, 'Eleven principles of effective character education', *Journal of Moral Education*, vol. 25: 1, 1996.
- Matta, Muhammad Anis, *Membentuk Karakter Cara Islam*, Jakarta: Al-I'tishom, 2002.
- McLaughlin, Terry H., dan J.M. Halstead, 'Education in character and virtue', dalam J.M Halstead and T.H. McLaughlin (eds) (1999), *Education and Morality*, London: Routledge, 1999.
- Nucci, Larry P. dan Darcia Narvaez, *Handbook of Moral and Character Education*, New York: Routledge, 2008.
- Umiarso dan Imam Gozali, *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2010.

**Sumber Internet**

- Thobib Al-Asyhar, *Pembentukan Karakter Manusia Menurut Para Ahli*, [Online]. [http://psi-islami.blogspot.com/2010/08/pembentukan-karakter-manusia-menurut\\_02.html](http://psi-islami.blogspot.com/2010/08/pembentukan-karakter-manusia-menurut_02.html), 02 Agustus 2010.
- <http://www.goodcharacter.com/index.html>; Teaching Guide Topics For HIGH SCHOOL, MIDDLE SCHOOL, And ELEMENTARY SCHOOL